

KK
Pid 10/01
Aiy
P

SKRIPSI

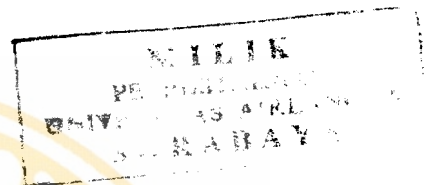
TEUKU ZULFIKAR AIYUB

PROSES PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

PROSES PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,

Penyusun,

R. Indarsoro, S.H.
NIP. 130325845

Teuku Zulfikar
NIM. 039514141

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

PROSES PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

SKRIPSI

**Telah diuji dihadapan panitia penguji
pada tanggal 21 Desember 2000**

Tim Penguji Skripsi :

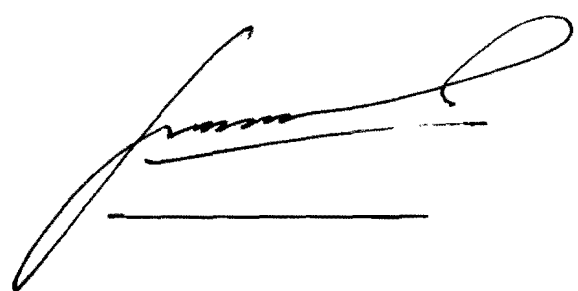
Ketua : Maarten. L. Souhuka, DR, S.H.,MS.



Anggota : 1. R. Indiarero, S.H.



2. Machsun Ali, S.H.,MS.



BAB IV

PENUTUP



1. Kesimpulan

- a Dalam pelaksanaan kegiatan penempatan TKI ke luar negeri terdapat 3 (tiga) pihak yaitu PJTKI, Pengguna Jasa dan atau Mitra Usaha serta calon TKI dan atau TKI. Ketiga pihak ini mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Dalam proses penempatan tersebut terdapat dua macam perjanjian yaitu :

- Perjanjian Pengerahan.
- Perjanjian Kerja

Pada dasarnya kedua perjanjian diatas berbentuk baku, akan tetapi hal ini tidak mutlak artinya perjanjian tersebut dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara para pihak.

- b Pelaksanaan ekspor jasa Tenaga Kerja Indonesia yang telah dilakukan selama ini telah sesuai dengan prosedur akan tetapi perlu pembenahan di sektor tertentu agar tidak terjadi lagi pelanggaran dan tindakan yang tidak selayaknya yang menimpa para calon TKI dan atau TKI. Oleh karena itu Depnaker sebagai instansi yang terkait telah mengadakan pembenahan, misalnya pada sektor pemulangan TKI setelah kontrak mereka selesai. Pembenahan ini harus terus menerus dilakukan seiring dengan law enforcement Depnaker.

c Posisi TKI yang lemah memerlukan perhatian ekstra dari Pemerintah untuk lebih menekankan pada perlindungan terhadap TKI. Perlindungan tersebut meliputi :

- Perlindungan sebelum penempatan.
- Perlindungan selama penempatan (selama TKI berada di luar negeri).
- Perlindungan sesudah penempatan.

2. Saran

- a Pada saat ini, program ekspor jasa Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri telah memasuki tahap pembenahan dan pengembangan, oleh karena itu perlu diadakan pembenahan sistem kelembagaan. Misalnya dikeluarkan suatu Peraturan Menteri (Permenaker) tentang dibentuknya suatu lembaga yang memberikan pelayanan satu atap di beberapa lokasi. Sehingga apabila terdapat suatu keluhan ataupun masukan dapat ditampung dengan cepat dan masalah yang timbul cepat teratasi dan tidak berlarut-larut.
- b Dalam rangka pemberdayaan TKI dan dalam upaya menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada penyiapan/rekrutmen TKI, sebaiknya dilakukan kampanye-kampanye atau penyuluhan bekerja ke luar negeri melalui juru penerang yang terkait serta dilakukannya penayangan iklan layanan masyarakat sehingga masyarakat bertambah wawasannya tentang bagaimana cara bekerja di luar negeri dan mereka tidak merasa asing dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mengurangi tindakan sewenang-wenang oleh aparat ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab.